



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

RENCANA AKSI TAHUN 2023



Jl. Tulip No. 2 Way Mengaku - Liwa - Lampung Barat
Telp./Fax. (0728) 21164
Kode Pos 34811
2023

RENCANA AKSI 2023 BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Rencana Aksi 2023 berisi :

- A. Rencana Strategis Perangkat Daerah
- B. Strategi dan Arah Kebijakan
- C. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan
- D. Lampiran Rencana Aksi 2023

A. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas-tugas kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Lampung Barat.

Rencana aksi ini merupakan instrumen perencana dan alat kendali serta tolok ukur dalam penyelenggaraan kegiatan guna mendukung proses pembangunan di Kabupaten Lampung Barat agar lebih terarah dan terjadwal waktu pelaksanaan kegiatan demi tercapainya target indicator tujuan dan sasaran yang menjadi indicator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat.

Rencana aksi/kerja ini disusun selaras dengan Renja 2023 dan Renstra 2023-2026 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang dalam penyusunannya berpedoman pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026, mengacu dokumen tersebut, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 telah menetapkan tujuan setrategis yaitu :

Tujuan : Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat.

Indikator Tujuan : Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama.

Target Kinerja : 84.10 poin (Sangat Baik).

Adapun sasaran yang harus diwujudkan dalam rangka mencapai tujuan “Meningkatkan Keamanan, Ketertiban, Kenyamanan Dalam Kehidupan Masyarakat” yaitu :



Sasaran I : Menurunnya Konflik SARA.

Indikator Sasaran : Persentase Pengurangan Konflik SARA.

Teget Kinerja : 100%

Sasaran II : Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat

Indikator Sasaran : 1. Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi.

Teget Kinerja : 86% (Tahun 2024)

2. Persentase Organisasi Masyarakat Yang Mitra Dengan Pemerintah.

Teget Kinerja : 5,26%.

Dengan adanya penetapan tujuan dan sasaran berserta indikator dan targetnya maka hal tersebut menjadi acuan dan pedoman bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dalam menentukan strategi dan arah kebijakan perangkat daerah dalam mencapai target kinerjanya.

B. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi adalah pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi sebuah aktivitas dalam kurun waktu tertentu. Dengan memperhatikan Tujuan Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 serta untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat, berikut ini telah dirumuskan strategi sebagai berikut :

1. Memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila melalui pemanfaatan teknologi dan media digital.
2. Memperkuat pemahaman wawasan kebangsaan dan cinta tanah air kepada masyarakat.
3. Memperkuat kohesivitas masyarakat melalui pengelolaan kerukunan warga.
4. Melakukan sosialisasi Gerakan Hidup Rukun.
5. Memperkuat pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan Ormas.
6. Memberdayakan organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Kabupaten Lampung Barat.
7. Memperkuat kesadaran generasi muda untuk meningkatkan pemahaman

demokrasi.

8. Meningkatkan kesadaran politik dan demokrasi dengan melibatkan peran serta partai politik.

Begitu pula untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam perencanaan strategis dan rencana kerja tahun 2023 tersebut perlu ditetapkan suatu kebijakan sebagai berikut :

1. Pembinaan keragaman budaya dan kerukunan hidup antar-umat beragama.
2. Meningkatkan pemahaman tentang ideologi pancasila, wawasan kebangsaan, kesadaran bela negara, Kerukunan Umat Beragama, ketahanan ekonomi, ketahanan sosial budaya, deteksi dini, radikalisme, bahaya narkoba dan pembauran kebangsaan.
3. Pendidikan, pembinaan nilai-nilai pancasila.
4. Pengembangan dan penguatan nilai-nilai dan implementasi rasa cinta tanah air.
6. Meningkatkan dukungan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda).
7. Memperkuat koordinasi antar lembaga.
- 9 Pendidikan, Pembinaan, Pengembangan wawasan kebangsaan dan cinta tanah air.
- 10 Meningkatkan Pembinaan dan penguatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Forum-Forum Masyarakat.
12. Meningkatkan partisipasi politik masyarakat dengan melibatkan : Partai Politik, Organisasi Kemasyarakatan, Forum-Forum Masyarakat, Tokoh Politik, Tokoh Masyarakat, dunia Akademisi, Pemuda, Mahasiswa dan seluruh elemen masyarakat lainnya;
13. Memperkuat citra positif institusi dan kelembagaan politik;

C. Perjanjian Kinerja dan Kerangka Pendanaan

1. Perjanjian Kinerja

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat merupakan tekad dan janji rencana kinerja tahunan yang akan dicapai antara Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat yang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan Bupati Lampung Barat sebagai pimpinan yang memberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja ini merupakan suatu janji/kinerja yang akan diwujudkan oleh seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya.

Perjanjian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat dituangkan dalam sasaran program, kegiatan dan subkegiatan yang memiliki korelasi berupa turunan dari target Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat. Adapun tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja bagi perangkat daerah antara lain :

- a. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur.
- b. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur.
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
- d. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
- e. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Berikut adalah uraian target kinerja tahun 2023 sesuai dengan indikator kinerja utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat

yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2023 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat :

**Indikator Kinerja Utama Tahun 2023
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
1	Menurunnya Konflik SARA	Persentase Pengurangan Konflik SARA	100.00%
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi	(86% Tahun 2024)
		Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah	5,26%

2. Kerangka Pendanaan

Rencana program dan kegiatan serta pendanaan merupakan acuan setiap Perangkat Daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran rencana pembangunan daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan kedalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mengakomodir kebijakan sebagai wujud pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, maka pada tahun 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat memperoleh pagu anggaran sesuai dengan DPA-APBD Murni Tahun Anggaran 2023 memperoleh dukungan anggaran Rp. 5.284.895.112,00 yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.575.417.200,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.538.233.640,00 dan belanja Hibah sebesar Rp. 2.171.254.272,00, selanjutnya pada tanggal 29 Maret 2023 dilakukan pergeseran anggaran maka pada DPA-

APBD Pergeseran Tahun Anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat menjadi sebesar Rp. 20.045.326.025,00 dengan komponen perubahan alokasi anggaran menjadi Belanja Pegawai sebesar Rp. 1.530.998.142,00 Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp. 1.563.615.640,00 dan Belanja Hibah sebesar Rp. 16.950.712.243,00.

Pergeseran anggaran dilakukan dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kegiatan yang dipandang perlu dilaksanakan pada tahun 2023 ini guna menunjang pencapaian target kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat antara lain :

- a. Perubahan pengurangan anggaran pada program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada program ini dilakukan pergeseran anggaran yakni dengan adanya pengurangan pagu anggaran pada pos anggaran :

- 1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- 3) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

- b. Perubahan penambahan anggaran untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi.

Perubahan anggaran pada Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik dengan tambahan kegiatan yang dilaksanakan antara lain :

- 1) Pembuatan aplikasi SiTepat, dengan adanya pembuatan aplikasi ini diharapkan dapat mendukung proses monitoring pimpinan daerah terkait informasi proses penghitungan suara hasil pemungutan dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah Tahun 2024.
- 2) Hibah uang kepada Bawaslu Lampung Barat dan KPU Lampung Barat untuk biaya penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024. Dimana pada APBD Murni 2023 penempatan komponen belanja hibah tersebut berada di BPKD Kabupaten Lampung Barat.

Adapun kerangka pendanaan secara terperinci dalam program dan kegiatan sebagai berikut :

**Kerangka Pendanaan Program dan Kegiatan
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat
Tahun 2023**

NO	URAIAN PROGRAM/PROGRAM/KEGIATAN	PAGU APBD MURNI 2023	PAGU APBD PERGESERAN 2023
1	2	3	4
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1.823.598.822,00	1.779.494.142,00
1.1	Kegiatan Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	23.600.000,00	23,600,000,00
1.2	Kegiatan Administrasi keuangan perangkat daerah	1.559.834.200,00	1.516.485.142,00
1.3	Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	10.189.500,00	10,189,500,00
1.4	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	11.751.000,00	11,751,000,00
1.5	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.259.600,00	70.684.600,00
1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	86.551.400,00	68,351,400,00
1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.107.500,00	60.232.500,00
2	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	700.505.600,00	700,505,600,00
2.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	700.505.600,00	700,505,600,00
1	2	3	4
3	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	815.932.272,00	15,881,445,243,00
3.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. Serta Pemantauan Situasi Politik	815.932.272,00	15,881,445,243,00



1	2	3	4
4	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	420.043.500,00	487,005,500,00
4.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	420.043.500,00	487,005,500,00
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA	394.178.040,00	394,178,040,00
5.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	394.178.040,00	394,178,040,00
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	1.088.942.500,00	1.129.174.725,00
6.1	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	1.088.942.500,00	1.129.174.725,00
JUMLAH		5.284.895.112,00	20.415.907.930,00

Secara terperinci target kinerja dan keuangan per triwulan dapat terlihat pada Rencana Aksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lampung Barat terlampir.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Lampung Barat,



BURLIANTO EKA PUTRA, S.H
NIP. 197109241998031005



**RENCANA AKSI TINGKAT TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2023**

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN AKUMULATIF				SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN AKUMULATIF				NAMA JABATAN PENANGGUNGJAWAB
			TRW 1	TRW 2	TRW 3	TRW 4			TRW 1	TRW 2	TRW 3	TRW 4	
1	MENINGKATKAN KEAMANAN, KETERTIBAN, KENYAMANAN DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT	Indeks Kerukunan Hidup Umat Beragama	-	-	Sangat Tinggi (84.10)	Sangat Tinggi (84.10)	Menurunnya Konflik SARA	Persentase Pengurangan Konflik SARA	73%	78%	83%	100%	BURLIANTO EKA PUTRA, S.H. / KEPALA BADAN KESBANGPOL
							Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Partisipasi Masyarakat Yang Memiliki Hak Pilih Dalam Mengikuti Pesta Demokrasi	-	-	-	-	
								Persentase Organisasi Masyarakat Yang Bermitra Dengan Pemerintah	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	

Liwa, Maret 2023
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
NIP. 197109241998031005

RENCANA AKSI TINGKAT PROGRAM
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF TARGET	KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF TARGET	NAMA JABATAN PENANGGUNGJAWAB
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Trw 1 = 75,85 Poin	Trw 1 = Rp 412,096,427	WAHYUDI HERU ISKANDAR, S.Sos., M.I.P. / SEKRETARIS BADAN KESBANGPOL
					Trw 2 = 75,85 Poin	Trw 2 = Rp 1,001,222,461	
					Trw 3 = 75,85 Poin	Trw 3 = Rp 1,703,871,042	
					Trw 4 = 75,85 Poin	Trw 4 = Rp 1,779,494,142	
2	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Meningkatnya pemahaman idiologi dan wawasan kebangsaan masyarakat	Persentase pemahaman masyarakat terhadap idiologi dan wawasan kebangsaan	Trw 1 = 60%	Trw 1 = Rp 94,826,900	SUMARLIN, S.I.Kom., M.E.Sy. / KABID. IDIOLOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KESBA
					Trw 2 = 70%	Trw 2 = Rp 330,139,800	
					Trw 3 = 80%	Trw 3 = Rp 700,505,600	
					Trw 4 = 80%	Trw 4 = Rp 700,505,600	
3	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Meningkatnya peran Partai Politik dalam meningkatkan Etika dan Budaya Politik Partai Politik masyarakat	Persentase kontribusi peran parpol dalam meningkatkan etika dan budaya politik masyarakat	Trw 1 = 60%	Trw 1 = Rp 427,574,753	PANGKU HAZARONI, S.Pd. / KABID. POLITIK DALAM NEGERI DAN ORMAS
					Trw 2 = 65%	Trw 2 = Rp 864,557,272	
					Trw 3 = 69%	Trw 3 = Rp 6,471,576,872	
					Trw 4 = 69%	Trw 4 = Rp 15,662,162,243	
4	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Meningkatnya pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Masyarakat yang Terdata dan Aktif	Trw 1 = 55%	Trw 1 = Rp 248,446,000	PANGKU HAZARONI, S.Pd. / KABID. POLITIK DALAM NEGERI DAN ORMAS
					Trw 2 = 55%	Trw 2 = Rp 390,198,000	
					Trw 3 = 55%	Trw 3 = Rp 403,847,000	
					Trw 4 = 55%	Trw 4 = Rp 420,043,500	

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat	Persentase menurunnya kasus penyakit masyarakat	Trw 1 = 60%	Trw 1 = Rp 121,705,000	SUMARLIN, S.I.Kom., M.E.Sy. / KABID. IDILOGI WAWASAN KEBANGSAAN DAN KESBA
					Trw 2 = 65%	Trw 2 = Rp 267,991,040	
					Trw 3 = 71%	Trw 3 = Rp 379,248,040	
					Trw 4 = 71%	Trw 4 = Rp 394,178,040	
6	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Meningkatnya kewaspadaan aparatur dalam penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Persentase pencegahan konflik sosial di Kabupaten Lampung Barat	Trw 1 = 100%	Trw 1 = Rp 16,399,500	NAZORI, S.Sos. / KABID. KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK
					Trw 2 = 100%	Trw 2 = Rp 1,060,013,500	
					Trw 3 = 100%	Trw 3 = Rp 1,076,155,500	
					Trw 4 = 100%	Trw 4 = Rp 1,088,942,500	

Liwa, Maret 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
NIP. 197109241998031005

RENCANA AKSI TINGKAT KEGIATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF	KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF	NAMA JABATAN PENANGGUNG JAWAB	
						TARGET	TARGET		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	Trw 1 = 8 Dokumen 3 Laporan	Trw 1 = Rp 4,517,000	MUCHLISUN, S.IP., M.M. / PERENCANA AHLI MUDA	
						Trw 2 = 9 Dokumen 7 Laporan	Trw 2 = Rp 9,760,500		
				Tersusunnya Dokumen Penganggaran Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Penganggaran Daerah yang disusun	Trw 3 = 12 Dokumen 10 Laporan	Trw 3 = Rp 12,032,500		
				Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Trw 4 = 15 Dokumen 14 Laporan	Trw 4 = Rp 23,600,000		
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Trw 1 = 14 Orang	Trw 1 = Rp 330,463,527		MUCHLISUN, S.IP., M.M. / PERENCANA AHLI MUDA
				Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Trw 2 = 14 Orang 2 Dokumen	Trw 2 = Rp 851,921,461		
				Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Trw 3 = 14 Orang 2 Dokumen	Trw 3 = Rp 1,512,453,142		
				Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Trw 4 = 14 Orang 4 Dokumen	Trw 4 = Rp 1,516,485,142		
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Trw 1 =	Trw 1 = Rp 1,423,000		ELDA, S.H. / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						Trw 2 =	Trw 2 = Rp 7,356,000		
						Trw 3 =	Trw 3 = Rp 8,476,000		
						Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 10,189,500		
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Trw 1 =	Trw 1 = Rp 5,837,000		ELDA, S.H. / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						Trw 2 =	Trw 2 = Rp 5,837,000		
						Trw 3 =	Trw 3 = Rp 5,837,000		
						Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 11,751,000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	3 Paket Trw 1 = 6 Dokumen 6 Laporan	Trw 1 = Rp 28,392,800	ELDA, S.H. / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	3 Paket Trw 2 = 6 Dokumen 12 Laporan	Trw 2 = Rp 40,723,800	
				Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	3 Paket Trw 3 = 6 Dokumen 18 Laporan	Trw 3 = Rp 58,103,600	
				Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	3 Paket Trw 4 = 6 Dokumen 24 Laporan	Trw 4 = Rp 70,684,600	
				Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan surat-menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Trw 1 = 15 Laporan	Trw 1 = Rp 22,268,600	ELDA, S.H. / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
				Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Trw 2 = 30 Laporan Trw 3 = 45 Laporan	Trw 2 = Rp 44,241,700 Trw 3 = Rp 64,755,300	
				Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Trw 4 = 61 Laporan	Trw 4 = Rp 86,551,400	
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dipelihara	Trw 1 = 8 Unit	Trw 1 = Rp 19,194,500	ELDA, S.H. / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
						Trw 2 = 11 Unit	Trw 2 = Rp 41,382,000	
						Trw 3 = 12 Unit	Trw 3 = Rp 50,689,500	
						Trw 4 = 13 Unit	Trw 4 = Rp 60,232,500	
			2	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebijakan Teknis dan pementapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan
Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Trw 3 = 130 Orang Trw 4 = 130 Orang					Trw 3 = Rp 700,505,600 Trw 4 = Rp 700,505,600	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
3	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Trw 1 = 80 Orang 2 Laporan	Trw 1 = Rp 427,574,753	MERI ANTONI, S.H. M.M. / ANALIS KEBIJAKAN HALI MUDA	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Trw 2 = 210 Orang 10 Laporan		Trw 2 = Rp 864,557,272
					Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Trw 3 = 210 Orang 10 Laporan		Trw 3 = Rp 6,471,576,872
					Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Trw 4 = 210 Orang 10 Laporan		Trw 4 = Rp 15,662,162,243
4	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Kegiatan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Trw 1 = 46 Orang	Trw 1 = Rp 248,446,000	ANWAR SANI KHALIK, S.IP., M.M. / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
					Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Trw 2 = 46 Orang		Trw 2 = Rp 390,198,000
					Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Trw 3 = 46 Orang		Trw 3 = Rp 403,847,000
					Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Trw 4 = 1 Dokumen 46 Orang		Trw 4 = Rp 420,043,500
5	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Trw 1 = 70 Orang	Trw 1 = Rp 121,705,000	SYUBBHAL FATHON, SH.I. / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA	
					Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Trw 2 = 70 Orang		Trw 2 = Rp 267,991,040
					Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Trw 3 = 70 Orang 1 Laporan		Trw 3 = Rp 379,248,040
					Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Trw 4 = 70 Orang 1 Laporan		Trw 4 = Rp 394,178,040

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Trw 1 = 25 Orang 4 Laporan	Trw 1 = Rp 16,399,500	RINA WATI, S.IP. / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA dan YUZIR, S.E. / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
				Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Trw 2 = 25 Orang 8 Laporan	Trw 2 = Rp 1,060,013,500	
						Trw 3 = 25 Orang 12 Laporan	Trw 3 = Rp 1,076,155,500	
				Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Trw 4 = 25 Orang 15 Laporan	Trw 4 = Rp 1,088,942,500	

Liwa, Maret 2023
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,**



BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
NIP. 197109241998031005

**RENCANA AKSI TINGKAT SUB KEGIATAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SASARAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	KINERJA PER TRIWULAN AKUMULATIF TARGET	KEUANGAN PER TRIWULAN AKUMULATIF TARGET	NAMA JABATAN PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
1	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Trw 1 = 8 Dokumen	Trw 1 = Rp 2,702,000	MUCHLISUN, S.IP., M.M. / PERENCANA AHLI MUDA
							Trw 2 = 8 Dokumen	Trw 2 = Rp 2,702,000	
							Trw 3 = 10 Dokumen	Trw 3 = Rp 3,974,000	
							Trw 4 = 11 Dokumen	Trw 4 = Rp 4,034,000	
				Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Trw 1 =	Trw 1 = Rp -	MUCHLISUN, S.IP., M.M. / PERENCANA AHLI MUDA
							Trw 2 = 1 Dokumen	Trw 2 = Rp 2,815,000	
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp 2,815,000	
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 2,815,000	
				Koordinasi Dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Hasil koordinasi penyusunan Dokumen perubahan RKA-SKPD	Trw 1 =	Trw 1 = Rp -	MUCHLISUN, S.IP., M.M. / PERENCANA AHLI MUDA
							Trw 2 =	Trw 2 = Rp -	
							Trw 3 =	Trw 3 = Rp -	
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 2,355,000	
				Koordinasi Dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Trw 1 =	Trw 1 = Rp -	MUCHLISUN, S.IP., M.M. / PERENCANA AHLI MUDA
							Trw 2 =	Trw 2 = Rp -	
							Trw 3 =	Trw 3 = Rp -	
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 2,852,000	
				Koordinasi Dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Trw 1 =	Trw 1 = Rp -	MUCHLISUN, S.IP., M.M. / PERENCANA AHLI MUDA
							Trw 2 =	Trw 2 = Rp -	
							Trw 3 = 1 Dokumen	Trw 3 = Rp -	
							Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 4 = Rp 2,650,000	
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Trw 1 =	Trw 1 = Rp -	MUCHLISUN, S.IP., M.M. / PERENCANA AHLI MUDA
							Trw 2 = 1 Laporan	Trw 2 = Rp 1,508,500	
							Trw 3 = 1 Laporan	Trw 3 = Rp 1,508,500	
							Trw 4 = 2 Laporan	Trw 4 = Rp 3,229,000	

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Trw 1 = 3 Laporan Trw 2 = 6 Laporan Trw 3 = 9 Laporan Trw 4 = 12 Laporan	Trw 1 = Rp 1,815,000 Trw 2 = Rp 2,735,000 Trw 3 = Rp 3,735,000 Trw 4 = Rp 5,665,000	MUCHLISUN, S.IP., M.M. / PERENCANA AHLI MUDA
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Trw 1 = 14 Orang Trw 2 = 14 Orang Trw 3 = 14 Orang Trw 4 = 14 Orang	Trw 1 = Rp 330,463,527 Trw 2 = Rp 845,596,461 Trw 3 = Rp 1,506,128,142 Trw 4 = Rp 1,506,128,142	MUCHLISUN, S.IP., M.M. / PERENCANA AHLI MUDA
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 = Rp 2,218,000	MUCHLISUN, S.IP., M.M. / PERENCANA AHLI MUDA
				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Trw 1 = Trw 2 = 1 Dokumen Trw 3 = 1 Dokumen Trw 4 = 2 Dokumen	Trw 1 = Trw 2 = Rp 1,826,000 Trw 3 = Rp 1,826,000 Trw 4 = Rp 3,640,000	MUCHLISUN, S.IP., M.M. / PERENCANA AHLI MUDA
				Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Trw 1 = Trw 2 = 1 Dokumen Trw 3 = 1 Dokumen Trw 4 = 2 Dokumen	Trw 1 = Trw 2 = Rp 4,499,000 Trw 3 = Rp 4,499,000 Trw 4 = Rp 4,499,000	MUCHLISUN, S.IP., M.M. / PERENCANA AHLI MUDA
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 1 = Rp 1,423,000 Trw 2 = Rp 7,356,000 Trw 3 = Rp 8,476,000 Trw 4 = Rp 10,189,500	ELDA, S.H. / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 1 = Rp 5,837,000 Trw 2 = Rp 5,837,000 Trw 3 = Rp 5,837,000 Trw 4 = Rp 11,751,000	ELDA, S.H. / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang di sediakan	Trw 1 = 1 paket Trw 2 = 1 paket Trw 3 = 1 paket Trw 4 = 1 paket	Trw 1 = Rp 1,086,800 Trw 2 = Rp 1,086,800 Trw 3 = Rp 2,163,600 Trw 4 = Rp 2,163,600	ELDA, S.H. / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang di sediakan	Trw 1 = 2 paket	Trw 1 = Rp 3,165,000	ELDA, S.H. / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Trw 2 = 2 paket	Trw 2 = Rp 6,370,000	
							Trw 3 = 2 paket	Trw 3 = Rp 9,285,000	
							Trw 4 = 2 paket	Trw 4 = Rp 12,670,000	
				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang di sediakan	Trw 1 = 6 dokumen	Trw 1 = Rp 1,440,000	ELDA, S.H. / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Trw 2 = 6 dokumen	Trw 2 = Rp 2,880,000	
							Trw 3 = 6 dokumen	Trw 3 = Rp 4,320,000	
							Trw 4 = 6 dokumen	Trw 4 = Rp 5,760,000	
				Fasilitas Kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp 916,000	ELDA, S.H. / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = Rp 1,757,000	
							Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = Rp 2,610,000	
							Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp 3,596,000	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp 21,785,000	ELDA, S.H. / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = Rp 28,630,000	
							Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = Rp 39,725,000	
							Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp 46,495,000	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan surat-menyurat	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp 420,000	ELDA, S.H. / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = Rp 850,000	
							Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = Rp 1,280,000	
							Trw 4 = 12 Laporan	Trw 4 = Rp 1,700,000	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Trw 1 = 12 Laporan	Trw 1 = Rp 4,000,000	ELDA, S.H. / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
							Trw 2 = 24 laporan	Trw 2 = Rp 7,950,000	
							Trw 3 = 36 laporan	Trw 3 = Rp 11,950,000	
							Trw 4 = 48 laporan	Trw 4 = Rp 15,900,000	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Trw 1 =	Trw 1 = Rp 17,848,600	ELDA, S.H. / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN				
			Trw 2 =	Trw 2 = Rp 35,441,700					
			Trw 3 =	Trw 3 = Rp 51,525,300					
			Trw 4 = 1 Laporan	Trw 4 = Rp 68,951,400					

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11		
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Trw 1 = 5 unit	Trw 1 = Rp 10,187,500	ELDA, S.H. / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN		
							Trw 2 = 5 unit	Trw 2 = Rp 29,470,000			
							Trw 3 = 5 unit	Trw 3 = Rp 37,872,500			
							Trw 4 = 5 unit	Trw 4 = Rp 45,275,000			
						Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Trw 1 = 2 unit	Trw 1 = Rp 907,000	ELDA, S.H. / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
									Trw 2 = 5 unit	Trw 2 = Rp 3,812,000	
									Trw 3 = 6 unit	Trw 3 = Rp 4,717,000	
									Trw 4 = 7 unit	Trw 4 = Rp 6,857,500	
						Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Trw 1 = 1 unit	Trw 1 = Rp 8,100,000	ELDA, S.H. / KASUBBAG. UMUM DAN KEPEGAWAIAN
									Trw 2 = 1 unit	Trw 2 = Rp 8,100,000	
			Trw 3 = 1 unit	Trw 3 = Rp 8,100,000							
			Trw 4 = 1 unit	Trw 4 = Rp 8,100,000							
2	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhinika Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Trw 1 =	Trw 1 = Rp 62,769,000	PEGA YANTI, S.IP. / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA		
							Trw 2 = 50 Orang	Trw 2 = Rp 270,140,000			
							Trw 3 = 50 Orang	Trw 3 = Rp 640,505,800			
							Trw 4 = 50 Orang	Trw 4 = Rp 640,505,800			
					Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan Bela Negara Karakter Bangsa Pembauran Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Trw 1 = 40 Orang	Trw 1 = Rp 32,057,900	PEGA YANTI, S.IP. / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
							Trw 2 = 80 Orang	Trw 2 = Rp 59,999,800			
							Trw 3 = 80 Orang	Trw 3 = Rp 59,999,800			
							Trw 4 = 80 Orang	Trw 4 = Rp 59,999,800			
3	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah	Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Trw 1 = 80 Orang	Trw 1 = Rp 36,390,000	MERI ANTONI, S.H. M.M. / ANALIS KEBIJAKAN HALI MUDA		
										Trw 2 = 210 Orang	Trw 2 = Rp 129,547,500
										Trw 3 = 210 Orang	Trw 3 = Rp 129,547,500
										Trw 4 = 210 Orang	Trw 4 = Rp 129,547,500

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
				Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik Etika Budaya Politik Peningkatan Demokrasi Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan Perwakilan dan Partai Politik Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Pemantauan Situasi di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Trw 1 = 2 Laporan Trw 2 = 10 Laporan Trw 3 = 10 Laporan Trw 4 = 10 Laporan	Trw 1 = Rp 391,184,753 Trw 2 = Rp 735,009,772 Trw 3 = Rp 6,342,029,372 Trw 4 = Rp 15,532,614,743	MERI ANTONI, S.H. M.M. / ANALIS KEBIJAKAN HALI MUDA
4	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Kegiatan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Sub Kegiatan Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	Trw 1 = Trw 2 = Trw 3 = Trw 4 = 1 Dokumen	Trw 1 = Rp 4,355,000 Trw 2 = Rp 8,750,000 Trw 3 = Rp 16,349,000 Trw 4 = Rp 29,055,500	ANWAR SANI KHALIK, S.IP., M.M. / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas Pemberdayaan Ormas Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Trw 1 = 46 Orang Trw 2 = 46 Orang Trw 3 = 46 Orang Trw 4 = 46 Orang	Trw 1 = Rp 244,091,000 Trw 2 = Rp 381,448,000 Trw 3 = Rp 387,498,000 Trw 4 = Rp 390,988,000	ANWAR SANI KHALIK, S.IP., M.M. / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
5	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Dan Budaya	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Trw 1 = Trw 2 = 40 Orang Trw 3 = 40 Orang Trw 4 = 40 Orang	Trw 1 = Rp 10,380,000 Trw 2 = Rp 147,791,040 Trw 3 = Rp 178,922,640 Trw 4 = Rp 185,842,640	SYUBBHAL FATHON, SH.I. / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Trw 1 = 30 Orang	Trw 1 = Rp 109,765,000	SYUBBHAL FATHON, SH.I. / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
				Trw 2 = 30 Orang	Trw 2 = Rp 117,140,000				
				Trw 3 = 30 Orang	Trw 3 = Rp 120,265,000				
				Trw 4 = 30 Orang	Trw 4 = Rp 126,775,000				
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Trw 1 =	Trw 1 = Rp 1,560,000	SYUBBHAL FATHON, SH.I. / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
				Trw 2 =	Trw 2 = Rp 3,060,000				
				Trw 3 = 1 Laporan	Trw 3 = Rp 80,060,400				
				Trw 4 = 1 Laporan	Trw 4 = Rp 81,560,400				
6	Meningkatnya jumlah masyarakat yang paham terhadap kesatuan bangsa	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Trw 1 = 25 Orang	Trw 1 = Rp 9,221,500	RINA WATI, S.IP. / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
				Trw 2 = 25 Orang	Trw 2 = Rp 14,967,500				
				Trw 3 = 25 Orang	Trw 3 = Rp 18,725,000				
				Trw 4 = 25 Orang	Trw 4 = Rp 22,000,000				
				Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Trw 1 = 3 Laporan	Trw 1 = Rp 2,400,000	YUZIR, S.E. / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
				Trw 2 = 6 Laporan	Trw 2 = Rp 6,369,000				
				Trw 3 = 9 Laporan	Trw 3 = Rp 13,214,000				
				Trw 4 = 11 Laporan	Trw 4 = Rp 17,307,000				

1	2	3	4	5	6	8	9	10	11
				Sub Kegiatan Forum koordinasi Pimpinan Daerah	Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Trw 1 = 1 Laporan	Trw 1 = Rp 4,778,000	YUZIR, S.E. / ANALIS KEBIJAKAN AHLI MUDA
							Trw 2 = 2 Laporan	Trw 2 = Rp 1,038,677,000	
							Trw 3 = 3 Laporan	Trw 3 = Rp 1,044,216,500	
							Trw 4 = 4 Laporan	Trw 4 = Rp 1,049,635,500	

Liwa, Maret 2023
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



BURLIANTO EKA PUTRA, S.H.
NIP. 197109241998031005